



# Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi

Selasa 05 November 2024 13,00-14,00 F 2.5



# Bersikap Anti korupsi



Sikap anti-korupsi adalah

Perilaku atau pandangan yang menentang segala bentuk korupsi, baik dalam skala kecil maupun besar.

Korupsi sendiri adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang sering melibatkan suap, penggelapan dana, dan praktik tidak jujur lainnya yang merugikan orang lain dan menghambat kemajuan bersama.

Berikut beberapa prinsip dasar dalam bersikap anti-korupsi:



- **Transparansi:** Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, sehingga segala tindakan atau keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit oleh pihak yang berwenang atau masyarakat
- **Kejujuran dan Integritas:** Bertindak secara jujur dan tidak tergoda untuk mencari keuntungan pribadi yang melanggar aturan atau kode etik. Orang yang berintegritas tidak akan berkompromi dengan prinsip moral meskipun ada peluang untuk berbuat korupsi.

Berikut beberapa prinsip dasar dalam bersikap anti-korupsi:

- **Akuntabilitas:** Bersedia untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan, serta memastikan bahwa orang-orang dalam sistem atau organisasi juga bertanggung jawab atas peran dan tugasnya masing-masing.
- **Kesadaran Hukum:** Memahami undang-undang dan aturan terkait korupsi serta akibat hukum yang akan dihadapi jika melakukan tindakan korupsi.



Berikut beberapa prinsip dasar dalam bersikap anti-korupsi:

- **Kepedulian terhadap Keadilan Sosial:** Sadar bahwa korupsi menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas, khususnya golongan yang kurang mampu. Sikap anti-korupsi memperhatikan dampak negatif yang korupsi timbulkan pada pembangunan dan kesejahteraan sosial.



Berikut beberapa prinsip dasar dalam bersikap anti-korupsi:

• **Menolak Gratifikasi dan Suap:** Menolak hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi keputusan atau membuat seseorang merasa berutang budi.



• **Menghargai dan Mendorong Perilaku Etis:** Mendukung dan mempromosikan perilaku yang etis dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun masyarakat.

# Penyelenggara, Asas, Hak Kewajiban, Peran Masyarakat.



# 1. Penyelenggara

Penyelenggara anti-korupsi mengacu pada institusi atau lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi. Di Indonesia, lembaga-lembaga penyelenggara ini meliputi:

- **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):** Lembaga independen yang memiliki tugas utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- **Kepolisian dan Kejaksaan:** Mereka turut berperan dalam menangani kasus korupsi, terutama yang melibatkan tindak pidana dan penegakan hukum.
- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor):** Pengadilan khusus untuk mengadili kasus-kasus korupsi.
- **Lembaga Pengawas Internal:** Seperti Inspektorat di instansi pemerintah yang melakukan pengawasan internal agar tidak terjadi praktik korupsi.

## 2. Asas

Asas anti-korupsi merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Beberapa asas penting antara lain:

- **Transparansi:** Keterbukaan dalam segala aspek kegiatan pemerintah dan pengambilan keputusan, sehingga bisa diawasi publik.
- **Akuntabilitas:** Setiap pejabat atau lembaga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, sehingga dapat diukur dampak dan keefektifannya.
- **Keadilan:** Setiap tindakan dan kebijakan harus sesuai dengan hukum tanpa pilih kasih.
- **Profesionalisme:** Semua penyelenggara anti-korupsi diharapkan bekerja secara profesional, tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan tertentu.



### 3. Hak dan Kewajiban

Dalam rangka pemberantasan korupsi, baik pejabat maupun masyarakat memiliki hak dan kewajiban tertentu:

- **Hak:**

- Masyarakat berhak atas informasi yang jujur dan transparan mengenai kegiatan pemerintahan.
- Berhak melaporkan tindakan korupsi tanpa takut mendapatkan tekanan atau balasan.
- Berhak mendapatkan perlindungan ketika melaporkan atau berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

## Kewajiban:

- Aparatur sipil negara dan pejabat pemerintah berkewajiban bekerja sesuai aturan dan mencegah tindakan yang berpotensi korupsi.
- Masyarakat juga berkewajiban berpartisipasi secara aktif dalam mencegah dan melaporkan korupsi, serta tidak memberi atau menerima suap.





## 4. Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Beberapa cara masyarakat dapat berkontribusi dalam gerakan anti-korupsi adalah:

- **Mengawasi Kinerja Pemerintah:** Terlibat aktif dalam mengawasi proyek dan kegiatan pemerintah serta memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat.
- **Melaporkan Dugaan Korupsi:** Masyarakat bisa melaporkan dugaan kasus korupsi melalui kanal resmi seperti KPK atau Ombudsman.
- **Edukasi dan Penyebaran Kesadaran:** Membantu menyebarkan informasi mengenai pentingnya anti-korupsi dan mengedukasi orang lain agar sadar akan dampak buruk korupsi.
- **Tidak Terlibat dalam Tindakan Korupsi:** Masyarakat harus menolak pemberian atau permintaan gratifikasi, tidak menyuap pejabat, dan selalu mengikuti prosedur yang sah dalam urusan publik.

Thank you